

TAJUK RENCANA

Jangan 'Asbun' Pertamina Wajib Turun Demi Rakyat

Jangan 'asbun' apalagi bagi mereka yang duduk sebagai pejabat pemerintahan, anggota DPR-RI. Apalagi terkait kebutuhan pokok masyarakat. Warga kelas bawah.

Menyebut harga Pertamina seharga Rp20 ribu per liter bisa menyakitkan mahasiswa. Baru saja mereka datang ke jalan dengan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah menurunkan Pertamina yang naik drastis dua pekan lalu. Tiga-tiga muncul statement anggota DPR harga Pertamina tembus Rp20 ribu per liter jika mengikut harga keekonomian.

Fakta, kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina (RON 92) dan Rp12.300/liter menjadi Rp16.250/liter per Rabu (10/6) begitu mengejutkan masyarakat. Bagi warga mampu "oke-oke" saja. Tapi, banyak juga warga biasa yang menggunakan kendaraan roda 2 dengan Pertamina. Mau pakai Pertalitase atau mesin kendaraannya rusak. Pakai Pertamina menambah pengeluaran dalam situasi ekonomi sedang tidak baik-sah ini. Begitu juga dengan Pertamina Green dan (RON 95) naik dari Rp12.900/liter menjadi Rp17.000/liter.

Intisari:
"Dalam kondisi harga minyak dunia terus bergerak turun dan dibukanya kembali Selat Hormuz maka penurunan harga Pertamina hukumnya wajib sesuai janji Bahli!"

pemerintah yang memegang janji untuk menurunkan harga Pertamina (nonsubsidi) demi kepentingan rakyat.

Kita mencatat, sejak melanda petang Amerika-Israel menyerang Iran sekitar 3 bulan lalu kenaikan harga minyak dunia tidak terhalt. Cukup lama di atas 100 dolar per barel akibat Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi urat nadi peredaran kapal di mana 25 persen minyak dunia melewati selat itu. Konsekuensinya masyarakat negara mengalami gangguan ekonomi, harga barang naik, termasuk, perekonomian dalam negeri Indonesia ikut terdampak (bergelak).

Harga minyak menembus angka \$100 per barel satu minggu setelah serangan AS-Israel terhadap Iran, yang mengancam produksi dan pengiriman di seluruh Timur Tengah. West Texas Intermediate (WTI) sempat patokan utama minyak mentah AS melonjak melewati \$115 per barel.

Pasca terjadinya perdungan dan penandatanganan MoU Iran dengan Amerika membuat harga minyak dunia turun. Pada perdagangan Rabu (10/6) sudah menjadi \$90,40 dolar dan perkenbangan terdapat pada perdagangan Kamis (25/6), harga minyak Brent turun 40 sen atau 0,54 persen menjadi US\$72,34 saja per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melemah \$7,25 atau 0,38 persen ke level US\$70,07 per barel. Jika acuannya harga pasar minyak dunia yang sudah turun, harga Pertamina wajib diturunkan sebagaimana janji Menteri ESDM Bahlil.

Penurunan tersebut telah terjadi di Iran dan Amerika menghasilkan serangan langsung satu sama lain. Kedua pihak menahan diri dan siap berunding. Namun situasi di Timur Tengah belum sepenuhnya mereda. Iran menyatakan akan kembali melakukan penutupan Selat Hormuz apabila Israel terus mengempur kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan.

Hemat kita, perdungan delegasi Iran dan Amerika di Swiss masih berjalan "pans-dingin" yang berarti sangat mendingin tidak sepenuhnya tercapai kesepakatan. Apalagi saat kedua belah pihak memasuki protokol pengurangan nuklir. Iran tidak punya pilihan lain Iran tidak boleh punya nuklir dan sebaliknya poin ini dimengerti Iran.

Tapi sebagai kompensasi Iran memastikan pengusahaan Selat Hormuz menjadi jaminan sekaligus strategi untuk menekan Amerika untuk menutupi sejumlah poin MoU yang menguntungkan negara Islam Iran, seperti memekatkan zona Israel agar tidak lepas dari pengaruh Iran. Jika hal itu dilakukan, pertikaian antara dua kekuatan ekonomi Iran hingga penguasaan dari atas aset yang dimiliki Amerika, sejak dekade lalu. Selain itu, AS dan Iran yang menyuarakan rencana selanjutnya US\$300 miliar untuk rekonstruksi dan pembangunan Iran akibat perang AS-Juga wajib berkomitmen mengakhiri seluruh jenis sanksi terhadap Iran.

Tak pelak lagi dalam kondisi harga minyak dunia terus bergerak turun seiring dibukanya kembali Selat Hormuz—kapal tanker Indonesia juga sudah bisa melintas—dan MoU kesepakatan damai antara Iran dan Amerika maka penurunan harga Pertamina hukumnya wajib sesuai janji Bahli.

Surat Pembaca

Signifikansi Lapangan Merdeka Medan & Jalan Mr. Teuku Hasan

Bapak/Ibu dan Warga Medan dan masyarakat Sumatera Utara yang dimuliakan. Lapangan Merdeka adalah tempat pertama kali saya sang Mr. Teuku Muhammad Hasan, Sutan di antara 7 Gubernur di provinsi lainnya.

Setelah melobi pimpinan Jepang, Mr. Teuku Muhammad Hasan, bersama Ahmad Tahit, Ketua Barisan Pemuda Kemendikbud, dan Ki Sengendo seorang tokoh perguruan Taniwan Siswa, berdiri bersama di lapangan Merdeka Sumatera Timur untuk pertunjukan sirkus resmi dan terbuka. Mereka melakukan upacara pengabdian Sang Merah Putih di lapangan Fukuoka—atau lapangan Merdeka setelah kemerdekaan—waktu itu, dan menyampaikan kepada seluruh rakyat Sumatera Timur bahwa Kita Bangsa Kita Bangsa di Lapangan Merdeka.

Medan dimuliakan dengan Sirkus sebagai Ulu Kota Provinsi Sumatera. Karena itulah, hingga sekarang lokasi masih terus berupaya untuk memulihkan supaya peringkat Lapangan Merdeka disusulkan lagi dari Cagar Budaya Kota, menjadi Cagar Budaya Nasional. Situasi Proklamasi RI.

Kenapa? Mengingat selain kita punya pahlawan nasional, dan juga pahlawan Proklamator. Artinya, ada ratusan pahlawan Nasional, tetapi hanya ada dua pahlawan Proklamator, yakni: Sukarno-Hatta. Demikian juga halnya dengan lapangan Merdeka. Dari sejumlah lapangan Merdeka di Indonesia, Koalisi berbandangan, ada 7 atau 8 Lapangan Merdeka yang indikator statusnya sebagai Cagar Budaya Nasional. Situasi Proklamasi, yakni Lapangan Merdeka Medan dan Lapangan Merdeka Blang Padang, Banda Aceh, Empat di Jawa, satu di Kalimantan dan 1 lagi di Maluku!

Dalam perspektif BPUPKI, Aceh masuk di dalam provinsi Sumatera. Bukan wilayah yang berdiri sendiri atau otonom. Sedangkan dalam perspektif para Tokoh dan Masyarakat Aceh, karena Aceh tidak pernah dijajah Belanda, sesungguhnya Aceh tidak pernah ditaklukkan Belanda.

Dari beberapa sumber yang kita baca, justru di sanalah lebih dahulu Sang Merah Putih dikibarkan secara terbuka, yakni pada tanggal 25 Agustus 1945. Setelah Merah Putih dikibarkan di Lapangan Ikada, Monas, pada tanggal 19 September 1945.

Karena pengibaran Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 1945, hal itu dilakukan di Jl. Pegangsaan Timur 56, di dalam kurang dari seratus orang. Berbeda dengan di Lapangan Ikada, dilakukan secara terbuka dan dihadiri ratusan ribu masyarakat.

Kedua peristiwa penting dan signifikan itu, harusnya kita torbanikan bukan saja dalam buku, tetapi di jantung kita ini supaya menjadi ingatan bersama kita.

Hal kedua, Mr. Teuku Muhammad Hasan telah menjadi Pahlawan Nasional. Sebelum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, satu diantara yang menjadi syariahnya ialah, harus ada nama sang pahlawan pada sebuah jalan di suatu kota.

Pada tahun 2012, sebelum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pada waktu Dr. Abdullah, SE Ak menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara, Jl. Pangreh Sah penempatan nama jalan Teuku Muh. Hasan mengonfirmasi. Jl. Pangreh Sah penempatan nama jalan Teuku Muh. Hasan mengonfirmasi. Jl. Pangreh Sah penempatan nama jalan Teuku Muh. Hasan mengonfirmasi.

Hal ketiga yang signifikan, supaya tradisi pengibaran bendera Merah Putih, setiap tanggal 06 Oktober dilakukan di Lapangan Merdeka. Koalisi para pemuda, mahasiswa, dan mahasiswa di Lapangan Merdeka. Koalisi para pemuda, mahasiswa, dan mahasiswa di Lapangan Merdeka.

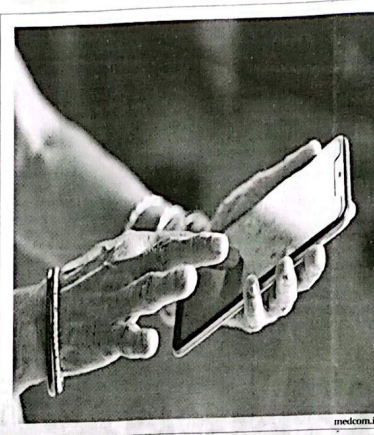
Semoga hal ini menjadi perhatian Wali Kota Medan, Riko Wasis. Mengingat sebagai hal ini menjadi perhatian Wali Kota Medan, Riko Wasis. Mengingat sebagai hal ini menjadi perhatian Wali Kota Medan, Riko Wasis.

Miduk Hutabarat
Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumut.

Rendahnya Verifikasi Informasi Pengguna Media

Oleh Dr H. Erwan Efendi, S. Sos, MA

Transformasi jurnalistik digital memungkinkan penyebaran informasi berlangsung lebih cepat dan luas, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks, clickbait, pelanggaran privasi, serta dominasi kepentingan ekonomi dalam produksi berita



Penerapan teknologi digital juga menghadirkan peluang bagi jurnalistik di era digital. Literasi media memungkinkan masyarakat untuk memahami proses produksi berita, mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, serta mengidentifikasi potensi misinformasi yang beredar melalui platform digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang lebih tinggi berkorelasi dengan kemampuan masyarakat dalam memilih informasi yang valid dan tidak valid. Meskipun literasi digital berkembang, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan verifikasi informasi pada pengguna media sosial berpotensi meningkatkan penyebaran misinformasi. Karena itu, penguatan literasi media dipandang sebagai langkah preventif yang dapat mendukung penerapan etika jurnalistik melalui peningkatan kualitas interaksi antara media dan audiens dalam ruang digital.

Penguatan AI memiliki potensi dalam mendukung proses verifikasi berita secara lebih cepat dan efisien. Teknologi AI mampu membantu proses identifikasi pola disinformasi, analisis data dalam jumlah besar, serta pendeteksian konten yang berpotensi menyesatkan. Derrick et al. (2024) menjelaskan bahwa AI dapat meningkatkan efektivitas proses verifikasi apabila digunakan berdasarkan prinsip akurasi, transparansi, dan pengawasan manusia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya menjadi sumber tantangan etika, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas jurnalistik apabila digunakan secara bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan AI dalam proses fact-checking masih memerlukan pengawasan manusia karena terdapat risiko yang dapat mengancam integritas jurnalistik. Menurut DeVries et al. (2023), meskipun kecerdasan buatan dapat membantu dalam verifikasi, namun AI belum mampu menggantikan esensi manusia secara penuh. Karena itu, integrasi AI dalam jurnalistik harus tetap dipahami sebagai alat pendukung proses verifikasi dan bukan pengganti peran jurnalis.

Peningkatan literasi media menjadi salah satu strategi yang paling sering direkomendasikan dalam menghadapi tantangan etika jurnalistik di era digital. Literasi media memungkinkan masyarakat untuk memahami proses produksi berita, mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, serta mengidentifikasi potensi misinformasi yang beredar melalui platform digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang lebih tinggi berkorelasi dengan kemampuan masyarakat dalam memilih informasi yang valid dan tidak valid.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Gokhale, Chaudhary, dan (2024) yang menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam jurnalistik harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar profesi jurnalistik. Dengan demikian, bahwa Teori Tanggung Jawab Sosial Pers masih relevan digunakan untuk mengkonstruksi jurnalistik digital yang bertanggung jawab. Meskipun teknologi telah mengubah mekanisme produksi dan distribusi informasi, tanggung jawab media terhadap publik tetap menjadi prinsip utamanya yang harus dipertahankan dalam menjaga kredibilitas, kepercayaan, dan kualitas informasi di ruang digital.

Dapat disimpulkan bahwa dinamika penerapan etika jurnalistik dalam praktik media digital menunjukkan adanya transformasi signifikan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi akibat perkembangan teknologi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi media dipandang sebagai langkah preventif yang dapat mendukung penerapan etika jurnalistik melalui peningkatan kualitas interaksi antara media dan audiens dalam ruang digital.

menunjukkan bahwa berbagai inovasi digital seperti fact-checking, penggunaan AI untuk verifikasi berita, dan penguatan literasi media merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai etika jurnalistik di tengah perubahan teknologi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Gokhale, Chaudhary, dan (2024) yang menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam jurnalistik harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar profesi jurnalistik. Dengan demikian, bahwa Teori Tanggung Jawab Sosial Pers masih relevan digunakan untuk mengkonstruksi jurnalistik digital yang bertanggung jawab. Meskipun teknologi telah mengubah mekanisme produksi dan distribusi informasi, tanggung jawab media terhadap publik tetap menjadi prinsip utamanya yang harus dipertahankan dalam menjaga kredibilitas, kepercayaan, dan kualitas informasi di ruang digital.

Dapat disimpulkan bahwa dinamika penerapan etika jurnalistik dalam praktik media digital menunjukkan adanya transformasi signifikan pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi akibat perkembangan teknologi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi media dipandang sebagai langkah preventif yang dapat mendukung penerapan etika jurnalistik melalui peningkatan kualitas interaksi antara media dan audiens dalam ruang digital.

Penulis adalah Wartawan Waspadana, Dosen Pascasarjana UINSU.

Memperkuat Relasi Ulama-Umaro

Oleh M. Ridwan Lubis

Sosok keulamaan itu akan dapat dilihat apabila dipelajari berbagai pelajaran kehidupan orang-orang yang memiliki wawasan pemahaman yang dalam terhadap agama dan selalu bertindak bijaksana dalam menuntun manusia menuju kepada jalan Tuhannya

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda. Ulama dan Umaro merupakan dua unsur masyarakat yang terbentuk melalui klasifikasi sosial yang berbeda.

dikaji kepada akar katanya, kalangan Umaro yang berbentuk kata jamak itu adalah orang yang selalu memikul tugas untuk menetapkan perintah atau kebijakan untuk masyarakat dalam masyarakat.

Daya pikat yang membuat masyarakat tertarik kepada mereka adalah karena dukungan solidaritas organik. Hal ini didasarkan misal yang mereka pikul secara sadar bertanggung jawab kepada kemajuan sebuah masyarakat dan pada langkah yang lebih luas yaitu bangsa.

Atas dasar itu, kesediaan mereka untuk bekerja sebagai menterjemah pergerakan pembangunan, karena mereka dibekali berbagai tanggung jawab sosial dan pemerintahan guna menggerakkan perkembangan kehidupan sosial kepada jalan yang baik. Atas dasar itu, sebagai umaro sesungguhnya mereka adalah pelaku pertama yang menjadi pilar percontohan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan ulama yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam bentuk penetapan secara spiritual dari masyarakat akan tetapi dari kemampuan mereka memenuhi berbagai persyaratan administratif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, apabila gambaran balasan yang diterima seorang ulama adalah semata-mata dari Allah yang tidak terbagi-bagi, maka penghargaan dari masyarakat akan tetapi seorang umaro, ganjarannya ditentukan oleh perolehan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan secara administratif.

Namun perlu disadari bahwa seorang yang telah dibekali masyarakat sebagai pemegang kendali terhadap komitmen keberagamaan maka hendaknya selalu berpijak pada kesadaran sebagai penguat

Penulis adalah Pemerintah Sosial Keagamaan, Tingkat Di Jakarta.

Pengumuman

Redaksi menerima karya tulis berupa artikel/opini, dan surat pembaca. Kirim ke e-mail: opiniwaspadana@yahoo.com. Artikel yang dikirimkan orisinal dan belum pernah dipublikasi di media manapun. Panjang artikel 5-7 ribu karakter dilengkapi biodata singkat (pendidikan dan pekerjaan) dan kartu pengenal (KTP atau SIM dll) perlu.

Tertulis mulai edisi 1 April 2022, tulisan yang dimuat tidak disediakan honor tulisan.

SUDUT BATUAH

• Ojol: Turunkan harga BBM
• Cook, he...he...he

• Jukir liar dikabarkan semakin meresahkan
• Karyanya, hampir tak ada lagi daerah bebas korupsi

• Pemko Medan dikesadai selamatkan aset terlarang
• Sebelum berpindah tangan

Wah Doo!